

Diskominfo
Kota Semarang

LAPORAN KINERJA JAGA FAKTA

2026



LAPORAN

JEJARING PENGAWASAN FUNGSI ANTI HOAKS KOTA SEMARANG

(JAGA FAKTA)

PERIODE JANUARI – JUNI 2026

a. Ringkasan Umum

Selama periode Januari hingga Juni 2026, Tim Jaga Fakta Kota Semarang telah merilis 22 laporan hoaks/penipuan.

Distribusi per Bulan:

Januari	1 hoaks
Februari	5 hoaks
Maret	4 hoaks
April	4 hoaks
Mei	3 hoaks
Juni	5 hoaks

Puncak aktivitas terjadi pada bulan Februari dan Juni (masing-masing 5 kasus).

b. Sumber Laporan

Sumber Laporan	Jumlah	Persentase
Tim Ahli	13	59%
Patroli Medsos	6	27%
Laporan Masyarakat	3	14%

c. Jenis Hoaks yang Dominan

Berdasarkan data yang ada, hoaks dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penipuan Impersonasi (Paling Dominan)

Banyak menggunakan nomor WhatsApp palsu yang mengatasnamakan pejabat tinggi.

Total kasus impersonasi via WA/Facebook: ±12 kasus (sekitar 55%).

2. Penipuan Rekrutmen/Pekerjaan

Rekrutmen pegawai Pemkot, Disbudpar, dll.

3. Hoaks lainnya :

- Program bantuan BPJS Kesehatan (transfer uang)
- Undangan APK, denda tilang, SIM online gratis

- Foto jalan rusak palsu
- Event palsu (Lomba Pelajar, Urban Fun Run)

Catatan :

- Setelah relatif rendah di Januari, jumlah hoaks naik mulai Februari dan tetap konsisten. Ini menunjukkan pelaku hoaks semakin aktif.
- Modus Utama: *Social Engineering* melalui WhatsApp adalah senjata utama pelaku. Mereka memanfaatkan nama dan jabatan pejabat daerah untuk membangun kepercayaan korban.
- Target: Masyarakat umum, terutama yang mudah terpengaruh informasi resmi (bantuan, rekrutmen, undangan, tilang).
- Efektivitas Jaga Fakta: Tim berhasil mendeteksi dini melalui patroli medsos dan laporan masyarakat, serta melakukan klarifikasi cepat. Namun, volume hoaks yang tinggi menunjukkan **perlu penguatan literasi digital masyarakat**.

Hal yang perlu diperhatikan :

- Perlunya meningkatkan sosialisasi cara verifikasi nomor resmi pejabat dan dinas, baik secara langsung ataupun melalui media sosial.
- Memperkuat literasi digital masyarakat terkait penipuan yang mengatasnamakan pejabat pemerintah dan cara untuk melakukan klarifikasi/verifikasi melalui kanal yang ada.

REKAP JAGA FAKTA

PERIODE : JANUARI – JUNI 2026

Sumber: jagafakta.semarangkota.go.id

No	Tanggal Posting	Sumber Laporan	Link	Judul
JANUARI				
1	01/01/2026	Patroli Medsos	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/01/01/jangan-klik-file-undangan-apk/	[HOAKS] File Undangan .APK
FEBRUARI				
2	02/02/2026	Tim Ahli	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/02/02/hoaks-tautan-denda-tilang-mengatasnamakan-kejaksaan-ri/	[HOAKS] : TAUTAN DENDA TILANG MENGATASNAMAKAN KEJAKSAAN RI
3	09/02/2026	Laporan Masyarakat	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/02/09/hoaks-nomor-whatsapp-mengatasnamakan-kepala-diskominfo-kota-semarang-didik-dwi-hartono/	[HOAKS] Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Kepala Diskominfo Kota Semarang Didik Dwi Hartono
4	18/02/2026	Laporan Masyarakat	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/02/18/hoaks-nomor-whatsapp-palsu-mengatasnamakan-dinas-kesehatan-kota-semarang/	[HOAKS] : Nomor Whatsapp Palsu Mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kota Semarang
5	19/02/2026	Patroli Medsos	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/02/19/hoaks-sim-online-gratis-2026-hingga-28-februari-2/	[HOAKS] SIM Online Gratis 2026 hingga 28 Februari
6	26/02/2026	Tim Ahli	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/02/26/hoaks-pesan-whatsapp-mengatasnamakan-wakil-wali-kota-semarang-ir-h-iswar-aminuddin-m-t/	[HOAKS] : Pesan WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Wali Kota Semarang Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T
MARET				
7	06/03/2026	Tim Ahli	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/03/06/klarifikasi-poster-lomba-pelajar-piala-dispora-bukan-event-resmi-dispora-kota-semarang/	Klarifikasi : Poster “Lomba Pelajar Piala Dispora” Bukan Event Resmi Dispora Kota Semarang
8	13/03/2026	Tim Ahli	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/03/13/hoaks-nomor-whatsapp-62-823-4350-0897-mengatasnamakan-kasie-pidsus-kejaksaan-negeri-kota-semarang/	[HOAKS] Nomor WhatsApp +62 823-4350-0897 Mengatasnamakan Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Semarang

9	13/03/2026	Tim Ahli	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/03/13/hoaks-akun-whatsapp-palsu-mengatasnamakan-pj-sekretaris-daerah-kota-semarang-budi-prakosa/	[HOAKS] Akun WhatsApp Palsu Mengatasnamakan Pj Sekretaris Daerah Kota Semarang, Budi Prakosa.
10	14/03/2026	Tim Ahli	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/03/14/hoaks-akun-facebook-palsu-mengatasnamakan-pj-sekda-kota-semarang-budi-prakosa/	[HOAKS] Akun Facebook Palsu Mengatasnamakan Pj Sekda Kota Semarang, Budi Prakosa
APRIL				
11	06/04/2026	Tim Ahli	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/04/06/waspada-penipuan-rekrutmen-mengatasnamakan-disbudpar-kota-semarang/	Waspada Penipuan Rekrutmen Mengatasnamakan Disbudpar Kota Semarang
12	15/04/2026	Laporan Masyarakat	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/04/15/hoaks-pesan-whatsapp-pemesanan-katering-mengatasnamakan-dinas-pendidikan-kota-semarang/	[HOAKS] : Pesan WhatsApp Pemesanan Katering Mengatasnamakan Dinas Pendidikan Kota Semarang
13	22/04/2026	Tim Ahli	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/04/22/hoaks-pesan-whatsapp-mengatasnamakan-kepala-dinas-kesehatan-kota-semarang-dr-mochamad-abdul-hakam-sp-pd/	[HOAKS] : Pesan WhatsApp Mengatasnamakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp. PD
14	24/04/2026	Patroli Medsos	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/04/24/hoaks-rekrutmen-pegawai-mengatasnamakan-pemkot-semarang/	[HOAKS] Rekrutmen Pegawai Mengatasnamakan Pemkot Semarang
15	24/04/2026	Tim Ahli	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/04/24/hoaks-foto-kondisi-jalan-rusak-beringin-rama-semarang/	[HOAKS] Foto Kondisi Jalan Rusak Beringin Raya Semarang
MEI				
16	18/05/2026	Tim Ahli	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/05/18/hoaks-program-bantuan-bpjs-kesehatan-rp125-juta-dengan-syarat-transfer-uang/	[HOAKS] Program Bantuan BPJS Kesehatan Rp125 Juta dengan Syarat Transfer Uang
17	22/05/2026	Patroli Medsos	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/05/22/hoaks-penipuan-menggunakan-foto-dan-identitas-walikota-semarang/	[HOAKS] : Penipuan Menggunakan Foto dan Identitas Walikota Semarang

18	25/05/2026	Tim Ahli	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/05/25/hoaks-nomor-whatsapp-palsu-catut-nama-sekretaris-dinas-kominfo-kota-semarang/	[HOAKS] : Nomor Whatsapp Palsu Catut Nama Sekretaris Dinas Kominfo Kota Semarang
JUNI				
19	03/06/2026	Tim Ahli	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/06/03/hoaks-nomor-whatsapp-mengatasnamakan-kepala-diskominfo-kota-semarang/	[HOAKS] Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Kepala Diskominfo Kota Semarang
20	06/06/2026	Patroli Medsos	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/06/06/hoaks-nomor-whatsapp-mengatasnamakan-camat-gunungpati-ali-ahmadi-s-stp-m-si/	[HOAKS] Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Camat Gunungpati Ali Ahmadi, S.STP., M.Si.
21	10/06/2026	Patroli Medsos	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/06/10/hoaks-nomor-whatsapp-mengatasnamakan-kepala-dinas-dan-staf-dinas-pertanian-kota-semarang/	[HOAKS] Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Kepala Dinas dan Staf Dinas Pertanian Kota Semarang
22	18/06/2026	Tim Ahli	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/06/18/hoaks-informasi-urban-fun-run-di-balaikota-semarang-pada-30-agustus-2026/	[HOAKS] Informasi Urban Fun Run di Balaikota Semarang pada 30 Agustus 2026

Laporan Analisis Jaga Fakta Kota Semarang

Juli 2026

Pada 1 Juli 2026, kanal Jaga Fakta Pemerintah Kota Semarang mencatat dua kasus disinformasi yang keduanya terkonfirmasi berstatus HOAKS.

Kasus pertama berkaitan dengan beredarnya nomor WhatsApp palsu yang mengatasnamakan pegawai (ASN) Diskominfo Kota Semarang. Sementara kasus kedua melibatkan pencatutan nama Wakil Wali Kota Semarang via WhatsApp, yang digunakan pelaku untuk modus penipuan permintaan atau penyaluran donasi ke masjid dan yayasan.

Analisis Singkat

Dari kedua data tersebut, terlihat bahwa penyebaran hoaks di Kota Semarang pada tanggal 1 Juli 2026 berfokus pada metode rekayasa sosial (*social engineering*) via aplikasi pesan singkat. Pelaku memanfaatkan kredibilitas instansi teknis (Diskominfo) serta figur pimpinan daerah (Wakil Wali Kota) untuk membangun kepercayaan publik. Penggunaan isu keagamaan, seperti bantuan donasi masjid, menjadi taktik utama untuk memanipulasi empati calon korban.

Catatan

- Risiko Kerugian: Modus penipuan donasi yang mengasnamakan pejabat daerah berpotensi menimbulkan kerugian finansial langsung bagi pihak pengurus rumah ibadah maupun yayasan sosial.
- Langkah Pencegahan: Setiap pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal yang mengaku sebagai pejabat atau pegawai Pemkot Semarang, terutama yang membahas uang atau hibah, wajib diverifikasi terlebih dahulu melalui saluran komunikasi resmi Pemerintah Kota Semarang.

Lampiran

NO	TANGGAL	STATUS	JUDUL	<u>LINK</u>
1	1 Juli 2026	HOAKS	[HOAKS] Nomor WhatsApp Mengatasnamakan ASN Diskominfo Kota Semarang	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/07/01/hoaks-nomor-whatsapp-mengatasnamakan-asn-diskominfo-kota-semarang/
2	1 Juli 2026	HOAKS	[HOAKS] Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Wali Kota Semarang untuk Modus Donasi Masjid dan Yayasan	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/07/01/hoaks-nomor-whatsapp-mengatasnamakan-wakil-wali-kota-semarang-untuk-modus-donasi-masjid-dan-yayasan/

Laporan Analisis Jaga Fakta Kota Semarang

Agustus 2026

Berdasarkan hasil pemantauan pada bulan Agustus 2026, nomor palsu yang mengatasnamakan ASN Pemerintah Kota Semarang masih ditemukan. Pada bulan Agustus, ditemukan setidaknya 3 informasi yang dikategorikan sebagai hoaks dan kemudian dilaporkan serta diklarifikasi melalui kanal Jaga Fakta. Ketiga temuan tersebut berkaitan dengan isu layanan pemerintah, diantaranya adalah bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP), serta penyalahgunaan identitas/nama pegawai Pemerintah Kota Semarang melalui aplikasi WhatsApp.

A. Analisis Temuan

1. Hoaks terkait DTKS/DTSEN, Aplikasi Cek Bansos, dan PIP

Temuan pada 10 Agustus 2026 berupa informasi dalam bentuk infografis yang membahas alur pendaftaran DTKS/DTSEN secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos untuk usulan Program Indonesia Pintar (PIP).

Dari sisi karakteristik informasi, isu ini termasuk kategori yang cukup sensitif karena berkaitan dengan bantuan pemerintah dan akses masyarakat terhadap program pendidikan. Selain berpotensi menyebabkan kesalahpahaman, informasi semacam ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, meminta data pribadi, atau mengarahkan masyarakat ke kanal yang tidak resmi.

Catatan:

Informasi terkait bantuan pemerintah perlu mendapatkan perhatian khusus dalam monitoring karena memiliki nilai ketersebaran yang tinggi. Konten dengan format infografis juga perlu diwaspadai karena tampilan yang menyerupai materi resmi dapat membuat masyarakat lebih mudah mempercayai informasi tersebut.

2. Hoaks Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang

Pada 12 Agustus 2026, ditemukan informasi mengenai nomor WhatsApp yang mengatasnamakan pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang. Temuan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan temuan pertama. Jika

temuan pertama berupa informasi layanan yang berpotensi menyesatkan, temuan kedua lebih mengarah pada penyalahgunaan identitas.

Penggunaan nama pegawai maupun instansi pemerintah melalui nomor WhatsApp dapat menciptakan persepsi bahwa komunikasi tersebut berasal dari pihak yang memiliki kewenangan. Kondisi tersebut berpotensi digunakan untuk meminta informasi, mengarahkan korban melakukan tindakan tertentu, meminta uang, maupun menjalankan bentuk penipuan lainnya.

Penggunaan identitas pegawai pemerintah menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian karena nama dan instansi resmi dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan calon korban.

Catatan :

Perlu dilakukan pemantauan lanjutan apabila nomor yang sama kembali muncul dengan modus berbeda. Selain itu, apabila terdapat laporan masyarakat terkait nomor tersebut, informasi dapat dihimpun untuk melihat apakah terdapat pola korban, sasaran, maupun modus komunikasi yang sama.

3. Hoaks Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Pegawai Dukcapil Kota Semarang

Temuan ketiga juga berkaitan dengan nomor WhatsApp yang mengatasnamakan pegawai Dukcapil Kota Semarang. Secara pola, temuan ini memiliki kemiripan dengan kasus nomor WhatsApp yang mengatasnamakan pegawai Dinas Pertanian. Keduanya sama-sama memanfaatkan identitas aparatur/instansi pemerintah sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan.

Perbedaan instansi yang digunakan menunjukkan bahwa modus impersonation tidak hanya menyasar satu perangkat daerah. Instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti layanan administrasi kependudukan, memiliki potensi menjadi sasaran karena masyarakat memang sering berkomunikasi atau berurusan dengan instansi tersebut. Isu yang mengatasnamakan Dukcapil juga perlu menjadi perhatian

karena berkaitan erat dengan data kependudukan dan data pribadi masyarakat.

Catatan :

Perlu diperkuat edukasi kepada masyarakat agar melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap nomor kontak yang mengatasnamakan pegawai pemerintah, terutama apabila komunikasi disertai permintaan data pribadi, dokumen, kode OTP, transfer dana, atau tindakan tertentu.

B. Analisis Pola dan Tren

Berdasarkan tiga temuan tersebut, terdapat beberapa pola yang dapat menjadi perhatian dalam pelaksanaan Jaga Fakta.

1. Isu layanan pemerintah menjadi sasaran hoaks

Dua dari tiga temuan berkaitan langsung dengan layanan dan program pemerintah, yaitu bantuan pendidikan/bantuan sosial serta layanan administrasi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan hoaks maupun penipuan.

2. Muncul pola impersonation melalui WhatsApp

Temuan pada 12 Agustus menunjukkan pola yang cukup jelas. Dalam satu hari ditemukan dua kasus dengan karakteristik yang hampir sama, yaitu: nomor WhatsApp → mengatasnamakan pegawai → menggunakan nama instansi pemerintah → berpotensi membangun kepercayaan masyarakat.

Kemunculan dua temuan dengan pola serupa perlu menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan bahwa modus penyalahgunaan identitas pegawai pemerintah melalui WhatsApp masih aktif dan berulang.

3. Pemanfaatan identitas pemerintah sebagai faktor kepercayaan

Nama perangkat daerah maupun pegawai pemerintah dapat memberikan kesan bahwa informasi atau komunikasi yang diterima masyarakat merupakan sesuatu yang resmi. Dalam konteks Jaga Fakta, hal ini menjadi penting karena klarifikasi tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu

informasi adalah hoaks. Masyarakat juga perlu diberikan cara mengenali ciri-ciri komunikasi resmi dan cara melakukan verifikasi.

4. Potensi risiko berkembang menjadi penipuan

Khusus untuk kasus nomor WhatsApp yang mengatasnamakan pegawai, risiko yang perlu diantisipasi bukan hanya penyebaran informasi palsu. Apabila modus tersebut berkembang, pelaku dapat mengarahkan masyarakat untuk memberikan data pribadi, dokumen kependudukan, kode OTP, melakukan pembayaran, atau mengakses tautan tertentu. Oleh karena itu, temuan dengan modus *impersonation* perlu diperlakukan sebagai informasi yang memiliki potensi risiko keamanan digital dan perlindungan data pribadi.

C. Catatan Monitoring

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam kegiatan Jaga Fakta selanjutnya:

1. Meningkatkan monitoring terhadap informasi yang mengatasnamakan perangkat daerah atau pegawai Pemerintah Kota Semarang, khususnya melalui WhatsApp dan media sosial.
2. Melakukan inventarisasi nomor WhatsApp yang pernah digunakan untuk impersonation, sehingga apabila nomor atau modus yang sama kembali muncul dapat segera dikenali.
3. Mendorong perangkat daerah untuk memiliki kanal komunikasi resmi yang mudah dikenali masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pembandingan ketika menerima pesan dari nomor pribadi yang mengatasnamakan pegawai.
4. Untuk isu bantuan sosial, pendidikan, dan layanan pemerintah, klarifikasi sebaiknya disertai dengan informasi mengenai mekanisme resmi, bukan hanya label “hoaks”. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami prosedur yang benar.
5. Konten klarifikasi sebaiknya menggunakan judul yang langsung menyebut modus atau klaim yang perlu diwaspadai, sehingga mudah dipahami dan dicari kembali oleh masyarakat.

6. Perlu dilakukan edukasi berkelanjutan mengenai verifikasi nomor, akun, tautan, dan sumber informasi resmi sebelum masyarakat memberikan data atau mengikuti instruksi tertentu.
7. Temuan yang berkaitan dengan data pribadi dan identitas pegawai perlu menjadi perhatian khusus karena berpotensi memiliki dampak lebih luas apabila tidak segera diklarifikasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring Jaga Fakta bulan Agustus 2026, ditemukan 3 informasi berstatus hoaks. Temuan terdiri atas satu isu mengenai mekanisme DTKS/DTSEN, aplikasi Cek Bansos dan usulan PIP, serta dua temuan mengenai nomor WhatsApp yang mengatasnamakan pegawai Pemerintah Kota Semarang, masing-masing dari Dinas Pertanian dan Dukcapil.

Dari ketiga temuan tersebut, terdapat indikasi bahwa informasi layanan pemerintah dan identitas aparatur masih menjadi objek yang dimanfaatkan dalam penyebaran informasi palsu maupun modus penipuan. Adanya dua kasus dengan pola yang serupa menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap modus impersonation melalui WhatsApp.

Lampiran

No	Tanggal	Judul	Link	Analisis Singkat
1	10/08/2026	[HOAKS] Infografis Alur Pendaftaran DTKS/DTSEN Mandiri via Aplikasi Cek Bansos untuk Usulan PIP	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/08/12/hoaks-nomor-whatsapp-mengatasnamakan-pegawai-dukcapil-kota-semarang/	Informasi mengaitkan proses pendataan/pendaftaran bantuan sosial dengan pengusulan PIP sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman masyarakat mengenai mekanisme resmi layanan pemerintah.
2	12/08/2026	[HOAKS] : Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/08/12/hoaks-nomor-whatsapp-mengatasnamakan-pegawai-dinas-pertanian-kota-semarang/	Terdapat indikasi penyalahgunaan nama atau identitas pegawai untuk menghubungi masyarakat melalui WhatsApp.
3	12/08/2026	[HOAKS] : Nomor Whatsapp Mengatasnamakan Pegawai Dukcapil Kota Semarang	https://jagafakta.semarangkota.go.id/2026/08/12/hoaks-nomor-whatsapp-mengatasnamakan-pegawai-dukcapil-kota-semarang	Modus serupa dengan temuan sebelumnya, yaitu penggunaan nama pegawai/instansi pemerintah untuk membangun kepercayaan melalui komunikasi WhatsApp.

